

**LAMPIRAN A.III.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 23 MEI 2011**

**KODE REKENING PENDAPATAN PROVINSI**

Kode Rekening					Uraian
1					2
4					PENDAPATAN DAERAH
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH
4	1	1			Pajak Daerah
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	1	01	01	A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)
4	1	1	01	02	A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)
4	1	1	01	03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)
4	1	1	01	04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)
4	1	1	01	05	C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)
4	1	1	01	06	C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)
4	1	1	01	07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)
4	1	1	01	08	D-1 Kendaraan Khusus (Umum)
4	1	1	01	09	E Sepeda Motor
4	1	1	01	10	F Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	01	11	Dst .....
4	1	1	02		Pajak Kendaraan di Air <sup>1)</sup>
4	1	1	02	01	Pajak Kendaraan di Air
4	1	1	02	02	Dst .....
4	1	1	03		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	1	1	03	01	A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)
4	1	1	03	02	A-2 Sedan, Jeep, Minibus (umum)
4	1	1	03	03	B-1 Bus, Micro Bus (pribadi)
4	1	1	03	04	B-2 Bus, Micro Bus (umum)
4	1	1	03	05	C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (pribadi)
4	1	1	03	06	C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (umum)
4	1	1	03	07	D-1 Kendaraan Khusus (pribadi)
4	1	1	03	08	D-1 Kendaraan Khusus (Umum)
4	1	1	03	09	E Sepeda Motor
4	1	1	03	10	F Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	03	11	Dst .....
4	1	1	04		Bea Balik Nama Kendaraan di Air <sup>1)</sup>
4	1	1	04	01	Bea Balik Nama Kendaraan di Air..... <sup>1)</sup>
4	1	1	04	02	Dst..... <sup>1)</sup>
4	1	1	05		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	1	05	01	Premium
4	1	1	05	02	Pertamax
4	1	1	05	03	Pertamax Plus
4	1	1	05	04	Solar
4	1	1	05	05	Gas
4	1	1	05	06	Dst .....
4	1	1	06		Pajak Air Permukaan
4	1	1	06	01	Pajak Air Permukaan
4	1	1	06	02	Dst ..... <sup>1)</sup>

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	1	07		Pajak Rokok
4	1	1	07	01	Pajak Rokok
4	1	2			Retribusi Daerah
4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum
4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	01	02	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	01	03	Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	01	04	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	01	05	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	01	06	Dst .....
4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	02	02	Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	02	03	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4	1	2	02	04	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	02	06	Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	2	02	07	Retribusi Pengolahan Limbah Cair <sup>1)</sup>
4	1	2	02	08	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	02	09	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	02	10	Dst .....
4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Trayek
4	1	2	03	02	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	2	03	03	Dst .....
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4	1	3	01		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4	1	3	01	01	Perusahaan Daerah
4	1	3	01	02	Dst .....
4	1	3	02		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4	1	3	02	01	BUMN
4	1	3	02	02	Dst .....
4	1	3	03		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
4	1	3	03	01	Perusahaan Patungan
4	1	3	03	02	Dst .....
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4	1	4	01	03	Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai
4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas
4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4	1	4	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	01	11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4	1	4	01	12	Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi
4	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian
4	1	4	01	14	Penjualan Hasil Kehutanan
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan
4	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan
4	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan
4	1	4	01	18	Penjualan Hasil Sitaan
4	1	4	01	19	Dst .....
4	1	4	02		Jasa Giro
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	02	02	Jasa Giro Pemegang Kas
4	1	4	02	03	Jasa Giro Dana Cadangan
4	1	4	02	04	Dst .....
4	1	4	03		Pendapatan Bunga
4	1	4	03	01	Rekening Deposito Pada Bank
4	1	4	03	02	Dst .....
4	1	4	04		Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4	1	4	04	01	Kerugian Uang Daerah
4	1	4	04	02	Kerugian Barang Daerah
4	1	4	04	03	Dst .....
4	1	4	05		Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4	1	4	05	01	Penerimaan Komisi dari .....
4	1	4	05	02	Penerimaan Potongan dari .....
4	1	4	05	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....
4	1	4	05	04	Dst .....
4	1	4	06		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	06	01	Bidang Pendidikan
4	1	4	06	02	Bidang Kesehatan
4	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum
4	1	4	06	04	Bidang Perumahan Rakyat
4	1	4	06	05	Bidang Penataan Ruang
4	1	4	06	06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4	1	4	06	07	Bidang Perhubungan
4	1	4	06	08	Bidang Lingkungan Hidup
4	1	4	06	09	Bidang Pertanahan
4	1	4	06	10	Dst .....
4	1	4	07		Pendapatan Denda Pajak
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Air <sup>1)</sup>
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Air <sup>1)</sup>
4	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	4	08		Pendapatan Denda Retribusi
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	4	08	04	Dst ..... <sup>1)</sup>

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	1	4	09		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4	1	4	09	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	09	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4	1	4	09	03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman
4	1	4	09	04	Dst .....
4	1	4	10		Pendapatan Dari Pengembalian
4	1	4	10	01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	10	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4	1	4	10	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	10	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	10	05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka
4	1	4	10	06	Dst .....
4	1	4	11		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4	1	4	11	01	Fasilitas Sosial
4	1	4	11	02	Fasilitas Umum
4	1	4	11	03	Dst .....
4	1	4	12		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4	1	4	12	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4	1	4	12	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4	1	4	12	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4	1	4	12	04	Dst .....
4	1	4	13		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4	1	4	13	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4	1	4	13	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4	1	4	13	03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4	1	4	14		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	14	01	Dari Kelompok Masyarakat.....
4	1	4	14	02	Dst .....
4	2				DANA PERIMBANGAN
4	2	1			Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan <sup>1)</sup>
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4	2	1	01	04	Dst .....
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4	2	1	02	11	Dst .....

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	2	2			Dana Alokasi Umum
4	2	2	01		Dana Alokasi Umum
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
4	2	3			Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01	01	Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01	02	Dst .....
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1			Pendapatan Hibah
4	3	1	01		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4	3	1	01	01	Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	02	01	Pemerintah Daerah .....
4	3	1	02	02	Dst .....
4	3	1	03		Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	1	03	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta .....
4	3	1	03	02	Dst .....
4	3	1	04		Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	04	01	Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	1	04	02	Dst .....
4	3	1	05		Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
4	3	1	05	04	Dst .....
4	3	2			Dana Darurat
4	3	2	01		Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4	3	2	01	02	Dst .....
4	3	3			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	3	01		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4	3	3	01	01	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .....
4	3	3	01	02	Dst .....
4	3	3	02		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4	3	3	02	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .....
4	3	3	02	02	Dst .....
4	3	3	03		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4	3	3	03	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .....
4	3	3	03	02	Dst .....
4	3	4			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Kode Rekening					Uraian
1					2
4	3	4	01		Dana Penyesuaian
4	3	4	01	01	Dana Penyesuaian .....
4	3	4	01	02	Dst .....
4	3	4	02		Dana Otonomi Khusus
4	3	4	02	01	Dana Otonomi Khusus .....
4	3	4	02	02	Dst .....
4	3	5			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	5	01		Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....
4	3	5	01	02	Dst .....
4	3	5	02		Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4	3	5	02	01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten .....
4	3	5	02	02	Dst .....
4	3	5	03		Bantuan Keuangan Dari Kota
4	3	5	03	01	Bantuan Keuangan Dari Kota .....
4	3	5	03	02	Dst .....

Keterangan:

1) Dihapus.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

**ZUDAN ARIF FAKRULLOH**  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19690824 199903 1 001